

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2020

BIRO HUKUM

PENGUATAN YURIDIS

NO	KEGIATAN	URAIAN
1	Partisipasi dalam penyusunan rancangan legislasi/ regulasi eksternal	1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (diundangkan tanggal 27 Juli 2020).
2	Rancangan dan harmonisasi peraturan (regulasi) internal	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Keempat Belas Tahun 2020 bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 – 2024. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Internal Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3	Rancangan Perjanjian / MoU, Peraturan bersama dan Pakta Integritas	<p>Terkait Perekaman Sidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PN Makassar Kelas IA Khusus Nomor 9 TAHUN 2020 - W22.U1/834/PL.01/2/2020 tentang Penempatan Perangkat Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PN Mataram Kelas IA Nomor 53 TAHUN 2020 - W25.U1/1375/PL.04.00/3/2020 tentang Penempatan Perangkat Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Diponegoro Nomor 51.2 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Amendemen Kedua atas Perjanjian Kerja Sama tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 52.1 Tahun 2020 – 279/UN8.1.11/KS/2020 tanggal 8 Maret 2020 tentang Amendemen Kedua atas Perjanjian Kerja Sama Nomor: SPJ-82.1/30-33/01/2017 – 299/UN8.1.11/SP/2017 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Katolik Atmajaya Nomor: 53.1 Tahun 2020 – 0311/III/FH-Dekan-KJS.10.03/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 17 Maret tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Sriwijaya Nomor 54.2 Tahun 2020- Nomor 167/UN9.1.2/KP/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 54.3 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Muslim Indonesia Nomor 78.1 TAHUN 2020 – 0887/C.06/UMI/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Mulawarman Nomor 131.2 Tahun 2020 – 3151/UN17/KS/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Mataram Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Perekaman Sidang. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PN Denpasar Kelas IA Nomor 153 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penempatan Perangkat Perekaman Sidang.

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<p>13. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 52 Tahun 2020 dan Nomor W10.U1/159/KS.00/I/2020 tentang Penempatan Perangkat Perekaman Sidang</p> <p>14. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas putera Batam Nomor 152 Tahun 2020 dan Nomor 011/MOU/UPB/IX2020 tentang Amandemen Atas Perjanjian Kerja Sama Nomor 231 tahun 2018-053/MoU/UPB/IX/2018 tentang Perekaman Sidang.</p> <p>15. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan Universitas Udayana Nomor 114 tahun 2020 dan Nomor B/6/UN14.2.4/HK.07.00/2020 tentang Amandemen Atas Perjanjian Kerja Sama Nomor 60 tahun 2020 dan Nomor 01A/UN14.2/KS/2019 tentang Perekaman Sidang.</p> <p>16. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Airlangga Nomor 53.2 TAHUN 2020 tentang Perekaman Sidang.</p> <p>17. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Universitas Riau Nomor 51.3 Tahun 2020 tentang Perekaman Sidang.</p> <p>Dengan Kementerian/Lembaga:</p> <p>18. Nota Kesepahaman antara KPK dengan KPPU Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>19. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pencegahan KPK dengan Kejaksaan Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara.</p> <p>20. Nota Kesepahaman antara KPK dengan Asosiasi Profesor Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 - 039/API/PK/VI/2020 TAHUN 2020 tanggal 30 Juni 2020 Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>21. Perjanjian Kerja Sama antara MRT dengan KPK Nomor CON/014/MRT/VII/2020 - 100.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kampanye dan Pendidikan Antikorupsi.</p> <p>22. Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Keuangan Nomor-04/SJ/2020 – 129 Tahun 2020 pada tanggal 24 Agustus 2020 tentang Kerja Sama dalam Mewujudkan Sistem layanan Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik melalui Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan secara elektronik pada KPK.</p> <p>23. Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kemendesa PDTT Nomor 107 Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.</p> <p>24. Nota Kesepahaman antara KPK dan Kementerian Kesehatan Nomor 361 tahun 2020 Tentang kerja sama dalam rangka</p>

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<p>mewujudkan pelaksanaan Program kesehatan yang bebas dari korupsi.</p> <p>25. Nota Kesepahaman antara KPK dan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 159.1 Tahun 2020 dan Nomor 21A/MOU-BPKH/10/2020 tetang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>26. Nota Kesepahaman antara KPK dengan BNPT, BNN dan BPIP Nomor 407 Tahun 2020, Nomor: HK.02.00/26/2020, Nomor: NK/65/XII/KA/HK/2020/BNN. Nomor MOU.46/Ka.BPIP/12/ 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, narkoba dan Penanaman Nilai Pancasila.</p> <p>27. Nota Kesepahaman antara KPK dengan LAN Nomor 159 Tahun 2020 – 18/K.1/HKM.03.1 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>28. Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Keuangan Nomor 140.1 tahun 2020 dan Nomor PRJ-7/MK.01/2020 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.</p> <p>29. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Informasi dan Data pada KPK dan Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor 117 Tahun 2020 dan Nomor 119/Perj.40-Bapenda/2020 tentang Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran.</p> <p>30. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan PT Telekomunikasi Selular Nomor 326.1 Tahun 2020 dan Nomor PKS.1017/LG.05/PD-00/X/2020 tentang Penyediaan Informasi dan Telekomunikasi.</p> <p>31. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PT ANGKASA PURA II (PERSERO) Nomor 363 Tahun 2020 dan Nomor PJJ.04.04/00/12/2020/0925 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>32. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Nomor 326.1 TAHUN 2020 tentang Penyediaan Informasi Telekomunikasi.</p> <p>Terkait Penanganan Pengaduan:</p> <p>1. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan nasional Nomor 381 Tahun 2020 dan Nomor 01/SKB-900/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>2. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 364 Tahun 2020 dan Nomor 25/PKS-BPKH/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<p>3. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 383 Tahun 2020 dan Nomor 5.Pj/05/IJN.S/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>4. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 365 Tahun 2020 dan Nomor 52/PKS-Pem/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>5. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor 366 Tahun 2020 dan Nomor 129 TAHUN 2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>6. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2020 dan Nomor 63/P-ITJEN/HK.01.07/XII2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>7. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 368 Tahun 2020 dan Nomor 9550/G/WS/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>8. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 369 Tahun 2020 dan Nomor HK.201/2/7/ITJEN-2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>9. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Kesehatan Nomor 362 Tahun 2020 dan Nomor HK.03.01/4/6936/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>10. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 380 Tahun 2020 dan Nomor PRJ-1/IJ/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>11. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 370 Tahun 2020 dan Nomor 19/SKB/SM/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>12. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Nomor 371 Tahun 2020 dan Nomor 1180/2/HK.03/12 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<p>13. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 372 Tahun 2020 dan Nomor 05/SJ/KKP/PKS/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>14. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 382 Tahun 2020 dan Nomor PKS.04/ITJEN/ITVES/SET.1/12/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>15. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 373 Tahun 2020 dan Nomor 6/47/HM.02.00/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>16. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 347 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>17. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 374 Tahun 2020 dan Nomor G/603/IV.01/HK/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>18. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 375 Tahun 2020 dan Nomor 051/12/PKS.SETDA.PKS/XII/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>19. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 376 Tahun 2020 dan Nomor 160.12/PKS/BPDJ/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>20. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 377 Tahun 2020 dan Nomor DSPN/SPJ/20/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>21. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 378 Tahun 2020 dan Nomor 01/PKS/IJ2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>22. Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 378 TAHUN 2020 dan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>MoU/PKS yang belum selesai/masih progres sampai TW 4 2020:</p> <p>1. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rancangan Nota Kesepahaman Bersama SPI antara KPK, Bappenas, Kemendagri, dan BPS 3. Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Dukcapil 4. Rancangan Petunjuk Teknis antara KPK dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang pertukaran informasi dan data melalui akses dan penggunaan aplikasi sistem database masyarakat 5. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Badan Kerja Sama Dekan FH Perguruan Tinggi Negeri Se Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan MPR tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 8. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan OJK tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Jasa Keuangan 9. Rancangan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Pertamina tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10. Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Pertamina tentang Kerja Sama Dukungan Personil Komisi Pemberantasan Korupsi di PT PERTAMINA (PERSERO) 11. Rancangan MOU antara KPK dengan Universitas Ichsan Gorontalo tentang Pengadaan melalui Swakelola 12. Rancangan MOU antara KPK dengan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha tentang Pengadaan melalui Swakelola 13. Rancangan MOU antara KPK dengan KASN 14. Rancangan MOU antara KPK dengan MK 15. Rancangan MOU KPK dan UGM 16. Rancangan MOU KPK dan KPU 17. Rancangan MOU antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional dan BPKP. 18. Rancangan MOU KPK dengan BPOM 19. Rancangan MOU KPK Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perencanaan pembangunan nasional, Lembaga Sandi Negara, tentang pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 20. PKS KPK dengan DJP tentang Optimalisasi penerimaan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi. 21. MOU KPK dengan BPJS Kesehatan 22. Nota Kesepahaman antara KPK dengan SPAK 23. Addendum PKS antara KPK dengan BNI
4	Penanganan Perkara (Litigasi)	<p>PERDATA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Banding Perdata Nomor: 10/Pdt/2020/PT.Sby j.o Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Bjn; Penggugat Rosmini (menang) 2. Putusan Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2020/PN.Sbg pada PN Sibolga; atas nama Penggugat PT. ANRA (menang) 3. Putusan Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2020/PN.Srl pada PN Sarolangun; Penggugat Melanesia Corruption Watch (menang) 4. Putusan Perdata Nomor: 07/Pdt.G/2020/PN.Srl pada PN Sarolangun; Penggugat Melanesia Corruption Watch (menang) 5. Putusan Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN.Ngw pada PN Ngawi; atas nama Penggugat Hadi Suharto (menang) 6. Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN.Srg pada PN Serang, atas nama Penggugat Supriyadi, S.Kom, M.M. (menang) 7. Putusan Perdata Nomor: 47/Pdt.G/2020/PN.Srg pada PN Serang; atas nama Penggugat Muhammad Kholid (menang) 8. Putusan Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn pada PN Bojonegoro; atas nama Penggugat Agus Susanto Rismanto (menang) 9. Putusan Perdata Nomor: 609/Pdt.G/2019/PN Smg pada PN Semarang; atas nama Penggugat Viktor Bakkara, SH., MH. (menang) 10. Putusan Perdata Nomor: 393/Pdt.G/2019/PN.Bdg pada PN Bandung; Penggugat Amin, Yuliani Mahdalena, Riyan Nurjaman, dkk (menang) 11. Putusan Perdata Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Skt; Penggugat Irjen Pol Drs. Djoko Susilo, SH., MSi, dkk. (menang) 12. Putusan Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Ngw atas nama Penggugat Suprianto (menang) 13. Putusan Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel; Penggugat PT. Sugriwa Agung dan Ilham Amrullah (menang) 14. Putusan Perdata Nomor: 210/Pdt.G/2019/PN.Smg pada PN Semarang; Penggugat Susan Andrian (menang) 15. Nomor: 382/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel; Penggugat Halimah, dkk & Tergugat PT.PLN, dkk. KPK Turut Tergugat IV, (Menang) 16. Nomor: 1013/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Muslimin & Tergugat KPK, dkk (Gugatan Dicabut) 17. Nomor: 132/Pdt.G/2019/PN Plg; Penggugat Hasyim Hamsyah; (Menang) 18. Perdata Nomor: 954/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; Penggugat Abdul Latif; (Dicabut oleh Penggugat) 19. Perdata Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Srg atas nama Penggugat Muhammad Kholid (Dicabut Penggugat)

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<p>PRAPERADILAN 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praperadilan Nomor: 101/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI dan LP2HI (menang) 2. Praperadilan Nomor: 128/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon MAKI (menang) 3. Praperadilan Nomor: 129/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Junaidin Ismail, S.H. (permohonan dicabut per tanggal 16 November 2020) 4. Praperadilan Nomor: 138/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon H. Abdul Latif (menang) 5. Praperadilan Nomor: 140/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Budiman Saleh (menang) 6. Banding atas putusan perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn pada PN Bojonegoro; Penggugat Agus Susanto Rismanto 7. Kasasi atas Putusan Banding 433/Pdt/2020/PT.Bdg jo. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Tsm; Penggugat Yaya Purnomo 8. Kasasi atas Putusan Banding Nomor: 77/PDT/2019/PT.Mtr jo. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2018/PN.Pya; Penggugat Lalu Ramli, Muttawib, Saprin dkk. 9. Nomor: 34/Pid.Pra/2019/PN.Bdg; Pemohon Dra. Dortiana Hutabarat, MM dan Robert John Lyncoln Hutabarat (Menang) 10. Nomor: 151/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel: Pemohon Bartholomeus Toto (Menang) 11. Nomor: 154/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT. Palma Satu. (Dicabut) 12. Nomor: 156/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI,LP3HI, dan PEKA (Menang) 13. Nomor: 157/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI,LP3HI, dan PEKA (Menang) 14. Nomor: 158/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI,LP3HI, dan PEKA (Menang) 15. Nomor: 159/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI,LP3HI, dan PEKA (Menang) 16. Nomor: 161/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon Rezki Herbiyono, Nurhadi, dan Hiendra Soenjoto (Menang) 17. Nomor: 05/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon LP2HI (Dicabut Pemohon) 18. Nomor: 08/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon MAKI dan LP3HI (Menang) 19. Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Rezki Herbiyono, Nurhadi, dan Hiendra Soenjoto (Menang) 20. Nomor: 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Fathor Rachman (Menang) 21. Nomor: 18/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Rahardjo Pratjihno (Menang) 22. Praperadilan Nomor: 66/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel; Pemohon LSM MAKI,LP3HI, dan PEKA (menang)

NO	KEGIATAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 23. Nomor: 45/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT. Palma Satu (Dicabut Pemohon) 24. Nomor: 47/Pid/Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT. Palma Satu (Dicabut Pemohon) 25. Nomor: 57/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon PT. Palma Satu (Dicabut Pemohon) <p>PTUN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan Kembali Nomor: 25PK/TUN/2020 jo. Putusan Kasasi Nomor: 129K/TUN/2019 jo. Putusan Banding Nomor: 225/B/2018/PT.TUN.Jkt jo. Putusan Nomor 206/G/2017/PTUN. Jkt; Penggugat Poppy Femialya. (Menang) 2. Kasasi Nomor: 64 K/TUN/2020 jo. Putusan Banding Nomor: 160/B/2019/PT.TUN.Jkt jo. Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUN-Jkt; Penggugat: Ir. Sujanarko, M.Eng, Hotman Tambunan dan Dian Novianthi. (Kalah) <p>Praperadilan yang masih dalam proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor: 133/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel; Pemohon Junaidin Ismail, SH. (sidang dimulai tanggal 4 November 2020, kemudian ditunda ke tanggal 14 Desember 2020 dan kembali ditunda ke tanggal 11 Januari 2021, update terakhir sidang ditunda ke tanggal 5 Februari 2021) 2. Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN.KIn pada Pengadilan Negeri Klaten, Pemohon Nikodemus Sukirno. <p>PTUN yang masih dalam proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor 136/G/2020/PTUN.JKT; Penggugat Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (proses persidangan) 2. Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi MA RI 64 K/TUN/2020 jo. Putusan PTUN Jakarta 213/G/2018/PTUN-JKT (proses PK) <p>Perdata yang masih dalam proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor: 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel pada PN Jakarta Selatan; Penggugat PT. Astra Sedaya Finance (proses persidangan) 2. Nomor: 868/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel pada PN Jakarta Selatan; Penggugat Iwan Cendekia Liman (proses persidangan) 3. Nomor: 156/Pdt.G/2020/PN.Srg pada PN Serang, Penggugat Ahmad Munji, M.Pd (proses persidangan) 4. Banding atas putusan Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Skt pada PN Surakarta, Penggugat IrjenPol. Drs. Djoko Susilo, SH., MSI dan Poppy Femialya (proses banding) <p>PERLINDUNGAN SAKSI 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Saksi a.n ECH (Jakarta) 2. Perlindungan Saksi a.n ELS (Jakarta) 3. Perlindungan Saksi a.n DWS (Jakarta) 4. Perlindungan Saksi a.n NRN (Jakarta)

NO	KEGIATAN	URAIAN
		5. Perlindungan Saksi a.n SJN (Jakarta) 6. Perlindungan Saksi a.n DHF (Jakarta) 7. Perlindungan Saksi a.n ASR (Jakarta) 8. Perlindungan Saksi a.n KMR (Kendari) 9. Perlindungan Saksi a.n HH (Kendari) 10. Perlindungan Saksi a.n DIR (Jambi) 11. Perlindungan Saksi a.n AMD (Jambi) 12. Perlindungan Saksi a.n AN (Medan) 13. Perlindungan Saksi a.n RTG (Medan) 14. Perlindungan Saksi a.n NW (Lampung) 15. Perlindungan Saksi a.n ABN (Lampung) 16. Perlindungan Saksi a.n RW (Bekasi) 17. Perlindungan Saksi a.n KK (Bekasi) 18. Perlindungan Saksi a.n EDS (Cikarang) 19. Perlindungan Saksi a.n DYN (Pontianak) 20. Perlindungan Saksi a.n LAM (Mojokerto) 21. Perlindungan Saksi a.n MHM (Aceh) 22. Perlindungan Saksi a.n ICL (Surabaya) 23. Perlindungan Saksi a.n CP (Jakarta) 24. Perlindungan Saksi a.n GYA (Surakarta) 25. Perlindungan Saksi a.n FAP (Lampung) 26. Perlindungan Saksi a.n YDW (Lampung)